

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan lingkungan hidup yang melanda dunia saat ini termasuk emisi gas rumah kaca dan juga perubahan iklim dikarenakan adanya faktor geografis, tetapi juga terdapat faktor lain yang berpengaruh besar dalam kerusakan lingkungan yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, contohnya adalah pembangunan lahan untuk resapan air dan daerah pertanian saat ini mengalami alih fungsi menjadi kawasan pemukiman bahkan kawasan industri. Emisi gas rumah kaca dan juga perubahan iklim mengakibatkan suhu dan iklim mengalami perubahan temperatur udara kian lama, kian panas. Dampak lain dari adanya perubahan iklim adalah iklim yang sekarang ini tidak menentu, jika dahulu waktu turun hujan dan kemarau dapat diprediksi maka saat ini akan cukup sulit untuk memprediksi hal tersebut karena banyak yang sudah berubah dari alam.

Penyebab dari perubahan iklim dapat disebabkan dengan meningkatnya jumlah berbagai macam gas seperti metana ( $\text{CH}_4$ ), karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ), hidrogen dioksida ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ), Nitrogen oksida ( $\text{NO}_2$ ) di atmosfer yang disebabkan dari adanya gas rumah kaca. Akibat alih fungsi lahan dan hutan, penggunaan bahan kimia untuk pupuk, penguraian limbah, serta penggunaan bahan bakar dari fosil memberikan dampak peningkatan emisi gas rumah kaca. Efek yang dihasilkan dari adanya emisi gas rumah kaca yaitu dapat mempertebal lapisan bumi, hal ini menyebabkan radiasi sinar matahari menjadi tertahan di atmosfer sehingga meningkatkan suhu di

permukaan bumi yang kemudian berdampak kepada pemanasan global dan memicu adanya perubahan iklim (Nielwaty dkk, 2023).

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) temperatur bumi bertambah 0,8 derajat celcius selama tiga abad terakhir, dan diperkirakan suhu bumi di tahun 2100 akan meningkat antara 1,4-5,8 derajat celcius (Rekavianti, 2019). Perubahan iklim perlu mendapatkan kepedulian serius dari seluruh negara dan setiap negara wajib untuk mengambil langkah nyata guna menangani masalah perubahan iklim yang sedang terjadi. Berdasarkan laporan IPCC dalam setengah abad terakhir aktivitas manusia menjadi penyebab utama perubahan iklim. Kegiatan manusia yang kurang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan membuat mekanisme dan juga siklus bumi yang berperan dalam mengatur iklim bumi menjadi terganggu, seperti adanya daur karbon dan efek rumah kaca.

Dampak perubahan iklim di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan dan mempunyai resiko yang cukup tinggi terkait perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, hingga abrasi pantai yang mengancam wilayah pesisir. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta perubahan iklim semakin memperburuk banjir tahunan. Berdasarkan keterangan kepala badan penanggulangan bencana daerah DKI Jakarta Isnawa Adji, banjir yang terjadi di Jakarta dikarekan adanya penyusutan air tanah. Penyusutan yang terjadi pada muka air tanah merupakan sebuah bahaya terbesar dari adanya perubahan iklim, bahkan di DKI Jakarta muka air tanah terus turun, yakni mencapai 0,2 meter per tahun dan penurunan ini sudah terjadi sejak tahun 1997. Hal ini menimbulkan kerugian Rp 2,1 Triliun setiap tahun

(Kompas, 2024). Awalnya perubahan iklim merupakan suatu hal yang biasa terjadi secara alami, tetapi seiring berjalannya waktu aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mendorong percepatan fenomena perubahan iklim. Selain itu selama periode tahun 2022, Indonesia sudah menjalani 3.544 bencana, dan sekitar 90% merupakan bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan keterangan dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG), adanya pola bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi di Indonesia meningkat semenjak 40 tahun belakangan. Kerusakan lingkungan dan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia diperkirakan oleh Bank Indonesia negara mengalami kerugian sebesar Rp100 triliun per tahun (Greenpeace, 2023). Selain DKI Jakarta wilayah pesisir lain yang terdampak banjir rob adalah wilayah pesisir utara Pulau Jawa, Papua, Kalimantan, dan Pesisir bagian timur dan bagian selatan Sumatra serta wilayah-wilayah pesisir lain yang merupakan dataran rendah. Hal ini disebabkan oleh ketinggian air laut dan juga penurunan muka air tanah. Sekitar 23 juta orang Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir diprediksi akan berhadapan dengan berbagai permasalahan lingkungan terutama banjir laut tahunan di tahun 2050, bahkan mengacu pada studi yang dilaksanakan oleh *Climate Central* yang merupakan organisasi non pemerintah di Amerika Serikat, jumlah yang ada bahkan meningkat lima kali lipat daripada perkiraan sebelumnya (BBC, 2020).

Adanya perubahan iklim mengharuskan semua pihak untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi bencana untuk masa yang akan datang sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Di Indonesia upaya untuk mengendalikan dampak dari adanya perubahan iklim dinilai penting utamanya di

daerah-daerah yang memiliki indikasi rentan terhadap perubahan iklim dan nantinya bisa menimbulkan dampak yang kompleks baik bagi manusia ataupun lingkungan itu sendiri. Tindakan adaptasi dan juga mitigasi terhadap perubahan iklim dapat saling terhubung lewat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan dan dilakukan bersama dengan melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah itu sendiri, kelompok masyarakat, ataupun pihak swasta. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Indonesia berupaya untuk memprakarsai adanya penciptaan program kampung iklim atau yang kemudian disingkat menjadi PROKLIM.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK RI No P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 1 telah dijelaskan bahwa program Kampung Iklim atau yang setelahnya diistilahkan sebagai ProKlim merupakan sebuah program berskala nasional yang diatur dan diurus oleh KLHK serta bertujuan untuk menambah partisipasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya untuk dapat melaksanakan upaya pemantapan yang berkaitan dengan kapasitas adaptasi terhadap adanya dampak perubahan iklim serta menyampaikan penerimaan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilaksanakan dan mampu untuk menambah kesejahteraan masyarakat pada skala lokal sesuai dengan kondisi daerah.

Program ini bertujuan mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terkait perubahan iklim serta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Proklim sendiri dapat dibangun dan juga dilaksanakan di wilayah maksimal setingkat desa/kelurahan dan minimal setingkat dengan

dusun/dukuh/RW. Dalam program ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) berupaya mengurangi adanya dampak yang ditimbulkan dengan menggandeng berbagai kemitraan serta mengajak kolaborasi dengan berbagai aktor yang mempunyai tujuan untuk dapat memperkuat keseluruhan kemampuan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang berdasar pada pemberdayaan masyarakat.

Proklam merupakan sebuah program yang diimplementasikan pada taraf lokal tetapi dilaksanakan dengan skala nasional. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam memenuhi target dari penurunan gas rumah kaca secara nasional. Pelaksanaan program kampung iklim (PROKLIM) memanfaatkan sumber daya pengembangan wilayah yang berada di tingkat lokal beserta suguhan informasi dan data yang kemudian akan diolah dan di proses menjadi suatu formulasi kebijakan, kegiatan atau program-program lain yang bertujuan untuk mengurangi adanya dampak dari perubahan iklim.

Secara umum, pelaksanaan PROKLIM di Indonesia sudah melibatkan beberapa aktor-aktor lain. Hal ini terwujud pada aktor pemberdayaan yang ada tidak hanya berasal dari lingkup masyarakat semata atau dari pemerintah itu sendiri. Tetapi juga berasal dari berbagai lini seperti masyarakat, lembaga swadaya, hingga korporasi. Dalam hal ini pemerintah melibatkan peran dari berbagai *stakeholders*. *Stakeholders* merupakan individu dan/kelompok yang memiliki sebuah kepentingan dan terlibat pada suatu program atau kegiatan pembangunan (Budimanta, 2008). Karena setiap pemangku kepentingan memiliki fungsi serta tugas yang berbeda serta penting untuk dimengerti dengan sebaik-baiknya agar

pengembangan dan pelaksanaan program yang ada disuatu daerah bisa dilaksanakan dengan baik, termasuk peran para *stakeholders* dalam pengelolaan program kampung iklim (PROKLIM).

Di Indonesia sendiri Proklam yang sudah diluncurkan memiliki dasar hukum pelaksanaan yang direalisasikan pada peraturan yang bersumber dari Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang program kampung iklim. Kemudian guna menunjukkan arahan teknis terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam program kampung iklim, Dirjen pengendalian perubahan iklim selanjutnya mengesahkan peraturan Dirjen PPI No.P.1/PPI/SET/KUM.1/2017 tentang pedoman pelaksanaan program kampung iklim. Bersumber pada peraturan Direktorat PPI serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan program kampung iklim mempunyai beberapa elemen dan juga strategi yang dapat menjadi pondasi dasar Program kampung iklim. Kerangka yang ada yaitu berdasarkan pada Adaptasi, mitigasi, dan dukungan berkelanjutan.

Program kampung iklim dibagi dalam beberapa kategori yaitu proklam pratama, madya, dan utama. Apresiasi Proklam pratama diberikan kepada proklam yang memulai inisiasi awal, kemudian proklam madya diberikan kepada proklam yang sudah merealisasikan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga yaitu proklam utama, diberikan kepada proklam yang sudah mempunyai sistem kelembagaan yang baik dan memiliki program-program yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu proklam lestari.

**Gambar 1.1 Kategori Program Kampung Iklim**



Sumber : roadmap ProKlim KLHK, 2017

Berkaitan dengan komponen adaptasi yang pertama meliputi kegiatan penanganan, pengendalian dan prediksi dari berbagai fenomena alam yang meliputi banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, keausan, erosi, dan tanah longsor. Selain itu, komponen di dalam adaptasi yang berkaitan dengan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam hal ketahanan pangan serta pengendalian penyakit yang berkaitan dengan iklim. Kedua, yang berkaitan dengan komponen yang ada pada proses mitigasi, terdiri dari berbagai kegiatan meliputi pengelolaan limbah, baik limbah padat ataupun cair, pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) dan juga konservasi energi budidaya pertanian dengan tetap memperhatikan tujuan yaitu emisi yang rendah pada gas rumah kaca .

Penambahan penutupan vegetasi dan kegiatan yang berhubungan dengan upaya preventif dan pengendalian kebakaran lahan serta hutan. Ketiga, berkaitan dengan bagian dukungan keberlanjutan, terdiri dari beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh pelaksana ProKlim. Yang merupakan bagian pada dukungan keberlanjutan mencakup analisis manfaat, pembangunan, kapasitas, kebijakan, kelompok masyarakat, swadaya dan gender, serta dukungan eksternal (waste4change.com, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di berbagai daerah dengan hasil yang beragam. Shieva Nur Azizah dkk. (2023) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat meskipun peran pemerintah masih belum optimal. Elly Nielwaty dkk. (2023) menemukan rendahnya partisipasi masyarakat di Pekanbaru sehingga target ProKlim belum tercapai. Sementara itu, Rezki Feni Oktaviana dkk. (2021) menunjukkan keberhasilan jejaring aktor dalam ProKlim di Tanjungpinang, dan Novita Yulanda (2020) menyebut implementasi ProKlim di Padang Panjang cukup baik namun terkendala regulasi dan komunikasi antar-pelaksana. Penelitian lain oleh Sophi Alifiyah dan Herlina Muzanah Zain (2023) membuktikan kolaborasi antar aktor mendukung keberhasilan ProKlim, meskipun koordinasi lintas lembaga masih menjadi tantangan. Bahkan, Wiati Catur Budi dkk. (2022) dan Nurpeni dkk. (2022) menunjukkan efektivitas ProKlim masih rendah akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan pemerintah daerah.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ProKlim tidak hanya bergantung pada masyarakat, melainkan pada efektivitas kolaborasi multi-sektor.

Namun, penelitian tersebut masih belum banyak yang mendalami peran multi-sektor melalui perspektif *Collaborative governance* Ansell dan Gash. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi Gap dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada implementasi program dan keberhasilan program dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berbasis komunitas, tetapi kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana ketidakseimbangan sumber daya dan juga relasi kekuasaan mempengaruhi dinamika kolaborasi dalam implementasi program masih relatif terbatas. Selain itu penelitian program kampung iklim khususnya di wilayah pesisir Kota Semarang masih belum dilakukan, padahal daerah pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Menjaga dan ikut melestarikan lingkungan yang mencakup mampu menciptakan iklim yang ramah guna menunjang keberlangsungan kehidupan setiap manusia, karena tidak semata-mata tanggung jawab satu orang saja, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama. Dalam upaya pengendalian dan penjagaan lingkungan hidup setiap manusia memiliki ruang dan peran yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 70 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bersumber dari data yang dirilis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan hingga Juli 2024 jumlah Proklamasi yang sudah terbentuk telah mencapai lebih dari 10.113 unit dan diperkirakan akan terus bertambah (KLHK, 2024). Melihat adanya permasalahan iklim yang kini tengah menjadi isu lingkungan secara global, pelaksanaan program kampung iklim

diimplementasikan secara meluas ke berbagai kota, kabupaten, ataupun provinsi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kota Semarang.

Pemilihan lokasi penelitian yang dimulai dari konteks kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim di Jawa Tengah, khususnya di wilayah pesisir utara yang rentan akan banjir rob dan kenaikan air laut. Ancamana yang ada dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga meningkatnya intensitas kejadian hidrometeorologi yang menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu dampak negatif yang ada juga termasuk kerugian ekonomi yang ditimbulkan sejak tahun 2020-2024 kerugian yang harus ditanggung yaitu sekitar 14,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan dan juga mitigasi bencana. (Kompas, 2024). Selanjutnya penelitian ini memilih Kota Semarang karena wilayahnya yang berada di pesisir utara Jawa dan rentan akan bencana hidrometeorologi, salah satu peristiwa tercatat terdapat sekitar 11.128 jiwa terdampak dan lebih dari 3.500 rumah terendam. (BNPB,2021).

Kodisi ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan dan daerah mendorong untuk melakukan upaya mitigasi yang berbasis masyarakat. Selanjutnya pemilihan Kelurahan Tugurejo yaitu karena Tugurejo terdampak langsung dari adanya perubahan iklim. Di daerah ini terdapat banjir rob, intrusi air laut, dan 44,5 hektar tambak yang ada di Kelurahan Tugurejo terdapat genangan air yang stagnan, dan berakibat pada menurunnya produksi di sektor pertanian dan terdapat 2.500 penduduk pesisir yang bergantung besar pada tambak akan kehilangan mata pencahariannya (Morton dkk,

2019), selain itu Kelurahan Tugurejo juga sudah mengimplementasikan proklamasi dengan melibatkan berbagai aktor.

Hingga September 2023 setidaknya sudah terdapat 106 kampung iklim yang kemudian tersebar di 177 kelurahan dan 31 diantaranya lolos dalam penilaian nasional dan meraih peringkat madya, utama, dan lestari dari KLHK ([semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id), 2023). Kota Semarang yang merupakan kota pesisir di pulau Jawa yang mengalami peningkatan suhu udara yang disebabkan oleh perubahan iklim. Selain kenaikan suhu udara yang dirasakan dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dampak lain yang ditimbulkan adalah risiko banjir rob dan intrusi air laut. Perubahan iklim mengancam pesisir utara pulau Jawa.

Banjir rob menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat dan berakibat pada rusaknya bangunan serta sarana prasarana. Fenomena ini semakin tahun semakin parah di mana ketinggiannya semakin bertambah dan semakin meluas ke daratan dan hal inilah yang sedang terjadi di kota Semarang. Kawasan pesisir yang berada di Kota Semarang saat ini jumlahnya terbagi atas 6 kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Barat, kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Genuk, serta Semarang Utara. Keenam Kawasan pesisir itu, diperkirakan akan tergenang apabila terdapat peningkatan ketinggian muka air laut dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang setinggi 16 cm dan diperkirakan luasnya 2672,2 Ha (Diposaptono, 2009).

Salah satu wilayah yang terdampak dari adanya perubahan iklim di Kota Semarang adalah Kelurahan Tugurejo. Kelurahan Tugurejo sendiri merupakan salah satu kelurahan yang letaknya ada di pesisir dan jalur pantai Jawa Tengah

dengan topografi wilayah yang landai hingga datar. Pembangunan yang ada di daerah ini bisa dibilang cukup pesat karena terdapat terminal, Kawasan industri, pemukiman, pertanian, dan perikanan. Pembangunan yang dilakukan tanpa disertai dengan analisis dampak lingkungan serta pengelolaan lingkungan yang baik akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini dibuktikan dengan 44,5 hektar tambak yang ada di Kelurahan Tugurejo terdapat genangan air yang stagnan, dan berakibat pada menurunnya produksi di sektor pertanian dan terdapat 2.500 penduduk pesisir yang bergantung besar pada tambak akan kehilangan mata pencahariannya (Morton dkk, 2019).

Data dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) menyebutkan bahwa pada Bulan Maret 2024 terdapat enam wilayah banjir di Kota Semarang yang terbagi atas 40 kelurahan dan berdampak pada 158.137 jiwa, salah satu kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Tugurejo. (Tribun Pantura,2024). Adanya berbagai ancaman bencana alam yang akan timbul serta akibat yang dirasakan saat ini merupakan dampak dari perubahan iklim oleh masyarakat di Kelurahan Tugurejo mendorong mereka untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang baik. guna menunjang pengelolaan lingkungan hidup dan meminimalisir dampak dari adanya perubahan iklim Program kampung iklim (PROKLIM) pertama kali terbentuk di Kelurahan Tugurejo pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022 dikeluarkan SK Lurah Tugurejo nomor 411.6 / 029 / XII/2022 tentang pembentukan dan penetapan pengurus kampung iklim (PROKLIM) kelurahan Tugurejo

Gambar 1.2 Penghargaan Proklam Lestari Kelurahan Tugurejo



Sumber : radarsemarang.jawapos, 2024

Dalam pengelolaan program kampung iklim di kelurahan Tugurejo sudah menerapkan pengembangan kemitraan antar *stakeholders*, yang meliputi Pemerintah, akademisi, dunia usaha, LSM, serta masyarakat itu sendiri. Keseriusan kelurahan Tugurejo dalam pengelolaan Proklam membawa mereka untuk meraih tahapan di tingkat nasional untuk PROKLIM lestari bersama dengan proklam Purwokeling di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan. Penghargaan ini diberikan oleh KLHK dalam rangkaian festival LIKE 2 yang bertemakan “10 tahun kerja untuk sustainibilitas” yang berlangsung di Gedung JCC, Jakarta pada 8-10 Agustus 2024 (TribunJateng.com, 2024).

Festival LIKE 2 (Lingkungan, iklim, kehutanan, dan energi baru terbarukan) adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh KLHK dalam rangka road to COP ke-29 UNFCCC 2024 yang pada pertengahan bulan November akan diselenggarakan di Azerbaijan. Festival LIKE 2 merupakan wadah inspiratif bagi warga masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan ikut aktif dalam upaya

menjaga lingkungan. Berbagai kegiatan dilakukan dalam festival ini seperti pameran inovasi lingkungan, workshop yang berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan, serta diskusi panel bersama para pakar. Selain itu juga festival LIKE 2 kali ini menjadi ajang kolaborasi dari berbagai sektor seperti pemerintah, swasta, dan komunitas untuk saling bekerja sama mencari solusi inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks (KLHK, 2024).

Pemberian penghargaan kepada program kampung iklim (PROKLIM) kelurahan Tugurejo dan Proklam purwokeling, Kelurahan Purwoyoso sebagai proklam lestari dalam festival LIKE 2 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan pada beberapa indikator yaitu telah melalui tahap proklam utama, pengayaan adaptasi mitigasi Program Iklim, penguatan Kelembagaan, dan pembinaan ke-10 lokasi lain (KLHK, 2017). Untuk dapat menciptakan program kampung iklim yang lestari perlu melibatkan peran multi sektor dan tidak hanya bergantung Pada peran pemerintah saja tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan peran sektor swasta atau dalam hal ini disebut sebagai teori *Collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan kegiatan kolaborasi yang secara langsung menyertakan berbagai pemangku kepentingan di luar sektor pemerintahan dalam pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan publik atas pengelolaan dari program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007:544). Peran serta tanggung jawab dari pemerintah jika disinergikan dengan peran *stakeholders* maka diharapkan dalam pengelolaan program kampung iklim dapat terlaksana dengan lancar dan mampu untuk

memberikan output yang maksimal. Penelitian yang menggunakan fokus pada analisis *Collaborative governance* nantinya digunakan untuk menjelaskan sinergi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan program kampung iklim di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang.

Dalam pengelolaan program kampung iklim (Proklam) yang terdapat di Kelurahan Tugurejo melibatkan peran *stakeholders* lain. Dari sektor pemerintah yaitu terdapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Semarang, dan Kelurahan Tugurejo. Dari pihak swasta yaitu PT Kawasan Industri Wijayakusuma, selanjutnya dari sektor masyarakat yaitu Kelompok Mangrove dan Bank sampah mawar merah, kemudian dari sektor akademisi yaitu Dosen/Ahli Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dan kemitraan dari sektor lembaga swadaya masyarakat yaitu ketua Yayasan Bintari.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan program kampung iklim yang terdapat di Kelurahan Tugurejo menunjukkan adanya praktik kolaborasi di tingkat lokal. Kolaborasi yang ada melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi dan berbagai aktor lain yang memiliki kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Dalam pengelolaan lingkungan keterlibatan multi aktor tersebut penting karena permasalahan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu aktor saja, tetapi harus melibatkan sinergi dan kerjasama lintas sektor. Selain itu proklam yang terdapat di Kelurahan Tugurejo juga sudah menorehkan prestasi dan dijadikan percontohan nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berbasis masyarakat. Tetapi demikian, di balik keberhasilan fisik dan pengakuan administratif tersebut,

dalam pengamatan awal justru ditemukan adanya dinamika yang menarik antar aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Terdapat indikasi bahwa alur koordinasi dan juga inisiasi program kampung iklim masih cenderung bersifat *top down* kolaborasi, di mana peran pemerintah masih sangat sentral dan menggerakkan kolaborasi. Adanya fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan peran dan posisi antar aktor, terlebih jika melihat partisipasi yang berasal dari masyarakat dan unsur non pemerintah masih bersifat responsif terhadap arahan yang diberikan oleh sektor pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini diperlukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pola *top down collaborative governance* yang terjadi dalam pengelolaan program kampung iklim di Kelurahan Tugurejo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang yang telah disinggung sebelumnya maka dirumuskan masalah berupa bagaimana dinamika *Top Down Collaborative governance* dalam Pengelolaan Program kampung iklim di Kelurahan Tugurejo Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh lewat penelitian ini yaitu untuk dapat menganalisis dinamika *Top Down Collaborative governance* pada pengelolaan program kampung iklim di Kelurahan Tugurejo Kota Semarang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang sudah dijabarkan, maka penelitian ini diharapkan sanggup menyumbangkan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis, manfaat penelitian secara praktis yakni sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan *Collaborative governance* terhadap pengelolaan Program Kampung iklim di Kelurahan Tugurejo Kota Semarang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini mampu menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam keilmuan sosial, hal ini dapat membuka peluang bagi peneliti di masa mendatang untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana pemerintah mengkolaborasikan peran multisektor dalam pengelolaan Program Kampung iklim (PROKLIM).

#### **b. Bagi Masyarakat Kelurahan Tugurejo**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Kelurahan Tugurejo terkait bagaimana pengelolaan Program Kampung iklim (PROKLIM) yang sesuai agar dapat meminimalkan dampak dari adanya perubahan iklim. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini bisa berkaitan dengan peningkatan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi yang

pada gilirannya dapat meningkatkan aksi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

### c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan sebagai sumber acuan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait pengelolaan program kampung iklim (PROKLIM) sebagai upaya untuk adaptasi dan mitigasi dampak dari perubahan iklim dengan melibatkan sinergi dan kolaborasi berbagai sektor di luar pemerintahan itu sendiri. Selain itu juga dapat menjadi acuan dalam memperkuat faktor pendorong keberhasilan suatu program, sehingga dapat diterapkan di wilayah lain.

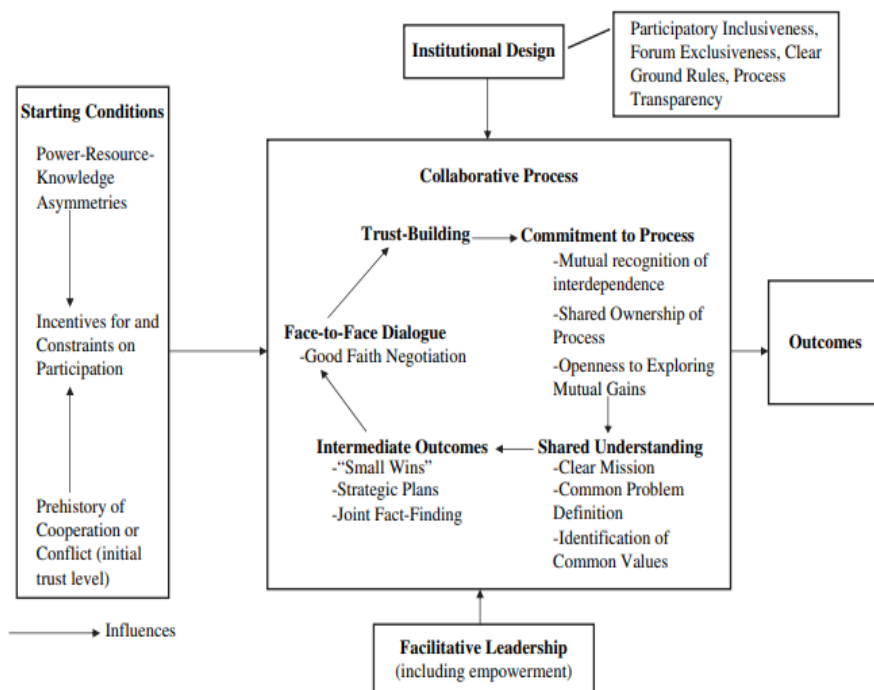
## **1.5. Landasan Teori**

### **1.5.1 Collaborative governance**

*Collaborative Governance* merupakan kegiatan kolaborasi yang secara langsung melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar sektor pemerintahan dalam pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan publik atas pengelolaan dari program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007:544). Definisi yang disampaikan oleh Ansell dan Gash ini menekankan pada enam kriteria penting yaitu forum yang dilakukan tersebut diprakarsai oleh suatu lembaga atau institusi publik, peserta forum yang terlibat meliputi berbagai aktor non-negara atau non-pemerintah, peserta harus terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan tidak hanya sekadar “dikonsultasikan” oleh lembaga-lembaga publik, Forum tersebut harus diselenggarakan secara formal dan para aktor bertemu

secara kolektif, forum yang dibuat bertujuan untuk membuat sebuah keputusan secara konsensus (meskipun pada praktiknya konsensus tidak tercapai), dan fokus dari kolaborasi yang dilakukan adalah manajemen publik atau kebijakan publik. (Ansell dan Gash, 2007:544-545). Selain itu *collaborative governance* juga dapat diartikan sebagai sebuah tata kelola antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan yang sama dengan peran yang berbeda antar aktor.

**Gambar 1.3 Model Collaborative governance**



Sumber : Ansell dan Gash (2007)

Untuk melakukan suatu kolaborasi dibutuhkan beberapa tahapan Ansell dan Gash (2007) dalam sentanu, dkk (2023) melalui model *Collaborative governance*,

menjelaskan dalam tahapan kolaborasi terdapat empat variabel yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

### 1. Kondisi Awal

Pada tahap ini mencakup kewajiban selama berkolaborasi didasarkan pada kepercayaan, konflik, dan modal sosial. Kondisi awal dapat menjadi penghambat ataupun memfasilitasi kolaborasi, hal ini dikarenakan para aktor atau *stakeholders* mempunyai visi bersama berkaitan dengan apa yang hendak mereka peroleh lewat proses kolaborasi. Sehingga dalam tahap ini mereka harus mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan ketidakpercayaan, antagonisme, maupun rasa tidak hormat agar tidak menghalangi proses kolaborasi. Dalam tahap kondisi awal terdapat tiga variabel utama yaitu :

- a. Ketidakseimbangan kekuasaan ataupun sumber daya
- b. Insentif yang dimiliki oleh para *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam berkolaborasi.
- c. riwayat kerjasama atau konflik antar *stakeholders* di masa lalu.

### 2. Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan merupakan sebuah protokol dan aturan dasar dalam berkolaborasi sangat vital bagi legitimasi prosedural di dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan meliputi inklusifitas partisipatif, memiliki aturan dasar tertulis yang jelas, dan proses yang transparan.

### 3. Kepemimpinan fasilitatif

Dalam tahap ini berfokus pada pemberian mediasi dan memfasilitasi selama proses kolaborasi berlangsung. Kepemimpinan fasilitatif penting untuk menggabungkan dan membuat para *stakeholders* saling terlibat dalam proses kolaborasi. Fasilitasi yang dimaksud adalah dengan tidak mengganggu hak prerogatif dari para *stakeholders*, tetapi peran fasilitator adalah memastikan integritas adanya pembangunan konsensus dalam proses kolaborasi, sehingga seorang pemimpin tetap boleh melakukan intervensi dengan cara yang lebih direktif untuk dapat menciptakan suatu rencana untuk memajukan kolaborasi. Kepemimpinan kolaboratif harus mampu untuk mendorong adanya partisipasi aktif, memfasilitasi proses produktif dinamika kelompok dan juga memperluas cakupan proses, selain itu juga harus mampu untuk memberdayakan serta mewakili *stakeholders* yang lemah.

### 4. Proses Kolaborasi

Ansel dan Gash (2007) menggambarkan tahap ini sebagai suatu proses yang bertahap dan berulang yang bersifat siklus. Hal ini berarti, kolaborasi bergantung kepada capaian siklus baik itu antara kepercayaan, komunikasi, pemahaman, komitmen, dan hasil. Proses kolaborasi merupakan suatu proses yang cukup memakan banyak waktu, mulai dari ketika para aktor atau *stakeholders* membangun konsensus dan proses membangun kepercayaan serta mengatasi berbagai konflik yang muncul dari para *stakeholders*. Proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dibagi menjadi lima indikator sebagai berikut :

a. *Face to Face Dialog*

Bagian ini penting karena menjadi proses awal ketika melakukan proses *collaborative governance* yang berfungsi sebagai koordinasi untuk bisa sampai ke proses-proses selanjutnya. Dialog tatap muka merupakan proses kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pada tempat dan waktu yang sama dan di situlah berlangsung sebuah forum diskusi langsung yang interaktif yang dapat digunakan untuk mendiskusikan mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai.

b. *Commitment to Process*

Pada tahap ini yang akan dinilai yaitu komitmen dari kesepakatan bersama saat menjalankan berbagai proses untuk dapat meraih tujuan yang telah disepakati oleh seluruh aktor yang terlibat secara bersama-sama. Dalam hal ini untuk dapat menciptakan setiap sektor yang terlibat saling bergantung untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan untuk menuntukan solusi bersama maka perlu adanya berbagi komitmen.

c. *Trust Building*

Membangun kepercayaan dimulai dengan membangun sebuah komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap aktor yang terlibat. membangun kepercayaan berarti bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki suatu niat yang sama untuk mengikuti sebuah kebijakan yang dapat memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh pihak. Dalam hal ini, seluruh peserta kolaborasi haruslah mempunyai kepercayaan dan kredibilitas berkaitan dengan kepentingan bersama. Mitra dari

kolaborasi juga harus mampu untuk memahami jika terdapat pihak yang saling tergantung untuk menciptakan kerjasama yang berkelanjutan

#### d. *Shared Understanding*

Yaitu mempunyai suatu interpretasi yang seragam dan juga pengertian bahwa kolaborasi ini merupakan tanggung seluruh pihak dan bukan tanggung jawab beberapa orang saja untuk dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada. Hal ini ditentukan oleh bagaimana nilai yang digunakan dalam proses ini dan dapat tergambar pada tujuan bersama, tujuan bersama, dan objektivitas bersama, ideologi yang mendasari, visi yang sama dll. berbagi pemahaman antar pihak mampu mempengaruhi konsensus untuk menafsirkan masalah.

#### 5. *Intermediate Outcomes*

Merupakan suatu capaian sementara yang ada dalam suatu proses kolaborasi yang sebelumnya sudah berlangsung serta mampu untuk memberikan hasil secara langsung.

Berdasarkan pada penjelasan di atas berkaitan dengan *collaborative governance*, maka bisa disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu bentuk kolaborasi yang dilaksanakan oleh berbagai aktor dan pemangku kepentingan selain aktor pemerintah itu sendiri dalam pengelolaan program atau aset milik publik, dengan melalui kelima tahapan proses di atas yang semuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga kelima tahapan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi melalui sebuah proses yang sistematis.

## 1.6 Definisi Operasional

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
<i>Collaborative governance</i> merupakan kegiatan kolaborasi yang secara langsung melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar sektor pemerintahan dalam pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan publik atas pengelolaan dari program atau aset publik (Ansell dan Gash, 2007:544)	1. Kondisi Awal	a. Sejarah awal kerjasama <i>stakeholders</i> di masa lalu b. ketidakseimbangan SDA c. insentif
	2. Desain Kelembagaan	a. Aturan Dasar seperti MOU, kesepakatan yang diwujudkan pada kegiatan pengelolaan program kampung iklim
	3. Kepemimpinan Fasilitatif	a. adanya peran pemimpin dalam memfasilitasi dialog antar <i>stakeholders</i> , menetapkan aturan-aturan yang jelas.
	4. Proses Kolaborasi	a. adanya dialog tatap muka antara pemerintah, swasta, dan masyarakat b. membangun kepercayaan yang baik antar <i>stakeholders</i> . c. Penguatan Komitmen untuk dapat mencapai tujuan bersama. d. memastikan semua <i>stakeholders</i> memiliki pemahaman bersama e. terdapat hasil sementara yang dapat memberikan dampak secara langsung

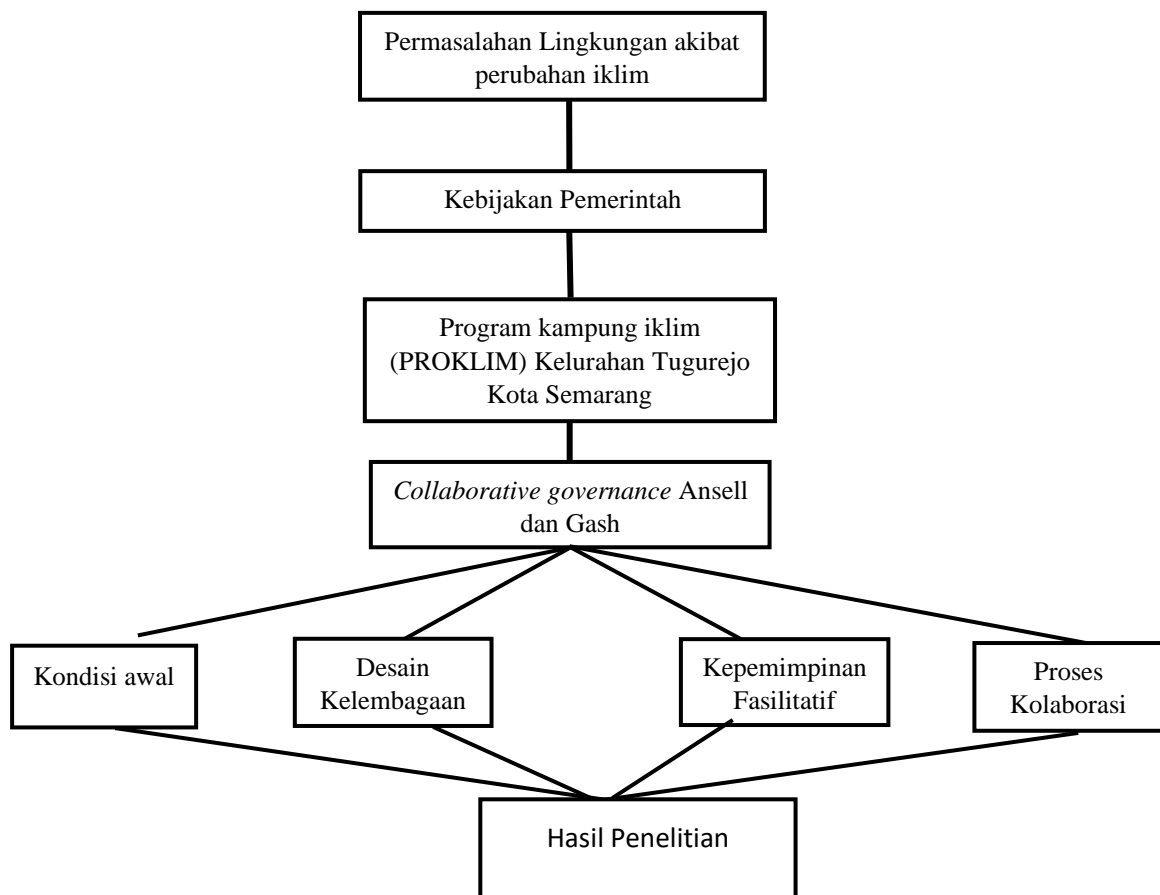
Dalam penelitian ini konsep utama yang dipakai yaitu teori *Collaborative governance* Ansell dan Gash. Konsep ini menjelaskan mengenai suatu bentuk tata kelola kolaboratif yang menyertakan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, baik yang bersumber dari sektor pemerintah ataupun dari non pemerintah berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan program atau juga aset publik. Agar konsep

ini dapat dianalisis secara empirik maka peneliti menggunakan operasionalisasi konsep yang diuraikan dalam beberapa indikator yang nantinya dapat diamati dan dikaji secara langsung ketika berada di lapangan. Operasionalisasi konsep ini didasarkan pada empat komponen utama, yang pertama yaitu kondisi awal dengan beberapa indikator yaitu riwayat kerjasama antar *stakeholders*, ketidakseimbangan sumber daya dan insentif yang mendorong partisipasi setiap aktor dalam proklamasi. Yang kedua yaitu desain kelembagaan, penelitian ini akan mencari tahu mengenai aturan-aturan baik formal ataupun informal seperti MoU, surat keputusan atau bentuk kerjasama lainnya, desain kelembagaan penting karena untuk dapat menjamin legitimasi dan juga kejelasan peran dari masing-masing aktor.

Indikator ketiga yaitu berkaitan dengan fasilitatif, peneliti akan melihat dan mengkaji bagaimana peran para pemimpin atau tokoh kunci dalam memfasilitasi dialog, menjadi mediator di tengah perbedaan, dan juga menjaga kesinambungan kerja sama yang terjalin antar aktor. Yang keempat yaitu proses kolaborasi, dengan indikator yaitu dialog tatap muka antar *stakeholders* untuk penguatan kelembagaan seperti rapat koordinasi atau rapat bersama, bagaimana kepercayaan dibangun dan dipertahankan untuk dapat membentuk suatu komitmen dalam proses kolaborasi, kemudian juga apakah terdapat komitmen antar *stakeholders* yang direalisasikan dalam bentuk program kerja, dan apakah semua aktor yang terlibat memiliki pemahaman dan tujuan yang sama terhadap pengelolaan program kampung iklim yang nantinya akan mempengaruhi nilai yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, serta apakah sudah ada hasil sementara yang memberikan dampak secara langsung baik dampak terhadap lingkungan, partisipasi masyarakat ataupun

peningkatan kemampuan untuk melakukan upaya adaptasi ataupun mitigasi perubahan iklim. Proses kolaborasi merupakan indikator inti untuk melihat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

### 1.7 Kerangka Berpikir



Permasalahan Lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim saat ini semakin kompleks dampak yang adapun juga dirasakan masyarakat yang ada di tingkat lokal, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir mengalami berbagai masalah mulai dari banjir rob, intrusi air laut dan juga penurunan produktivitas tambak. Seperti yang terjadi pada Kelurahan Tugurejo, yang berada di Kawasan pesisir barat Kota Semarang. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah, diinisiasikan adanya program kampung iklim untuk mengurangi dampak perubahan

iklim. Program ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di tingkat kelurahan bahkan RW, termasuk di Kelurahan Tugurejo. Dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada program yang dilaksanakan oleh aktor pemerintah saja, namun juga melibatkan aktor yang berasal dari non pemerintah seperti dari sektor masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan juga dari komunitas lokal. Untuk itu agar dapat memahami bagaimana kerjasama yang terjalin antar aktor digunakanlah teori *Collaborative governance* dari Ansell dan Gash.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif sering dijadikan sebagai analisis berbagai peristiwa, aktivitas ataupun suatu situasi secara sosial. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode dalam penelitian yang bermaksud untuk dapat mendeskripsikan, mengetahui sifat serta pengaruh-pengaruh sosial yang belum mampu diuraikan oleh metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, peneliti ingin mendeskripsikan secara luas bagaimana peran setiap aktor dan *process collaborative governance* yang terjadi dalam pengelolaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tugurejo dalam keberjalanan program mulai dari 2022 hingga 2024, untuk mendapatkan data terakait peran pemerintah dan *Stakeholderss* yang terlibat pada proses kerjasama dalam implementasi

*Collaborative governance* yang kaitannya dengan pengelolaan program kampung iklim (PROKLIM). Peneliti juga akan melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mendapatkan data tambahan yang lebih mendalam.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Peneliti mengambil subjek penelitian yang meliputi :

1. Agus Sumartono, S.T., M.Ling selaku Kepala Bidang Tiga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
2. Munjaenah,S.E selaku Lurah Tugurejo
3. Tatiek Sri Rochiati selaku Ketua Proklam Kelurahan Tugurejo
4. Tatiek Sri Rochiati selaku Ketua Bank Sampah Mawar Merah
5. Muhammad Abdul Rofiq selaku masyarakat yang terlibat dalam Proklam Kelurahan Tugurejo
6. Septian Adi Nur Saputra selaku masyarakat yang terlibat dalam Proklam Kelurahan Tugurejo
7. Sutopo selaku Masyarakat Kelurahan Tugurejo
8. Dr.Fuad Muhammad,S.Si., M.Si. selaku Dosen Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
9. Amalia selaku Direktur Pelaksana LSM Yayasan Bintari

10. Atika Rahma selaku pihak Corporate communication & CESR PT Kawasan Industri Wijayakusuma

#### **1.8.4 Sumber Data**

Sumber data yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu data primer (diperoleh langsung dari sumber dan informan) dan data sekunder (diperoleh melalui cara tidak langsung). Berikut sumber data yang digunakan :

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung melalui wawancara. Pertanyaan wawancara bersifat terbuka, hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali informasi dengan lebih mendalam terhadap informan. Data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan program kampung iklim (PROKLIM) di Kelurahan Tugurejo.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sebuah sumber data yang didapatkan dengan tidak langsung oleh peneliti yaitu melalui artikel ilmiah, laporan, dokumentasi, buku, peraturan pemerintah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan media internet sebagai sumber literatur tambahan, serta beberapa dokumen fisik yang nantinya akan peneliti temukan. Data sekunder yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menganalisis dan memperkuat temuan di lapangan terhadap permasalahan yang terjadi.

### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat sejumlah teknik untuk pengumpulan data yang sering digunakan di dalam Penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Wawancara(*indepth interview*)**

Wawancara adalah suatu metode tanya jawab dengan dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah yang diteliti dalam penelitian. Menurut Saroso (2017:47) wawancara adalah salah satu proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan seorang peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang valid dari responden atas pertanyaan yang dijawab. Metode wawancara juga memberikan ruang diskusi bagi peneliti dan narasumber untuk bertukar pikiran secara langsung dengan tujuan memperoleh data yang sesuai objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode wawancara dengan Lurah Tugurejo, Kepala bidang tiga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Sektor swasta yaitu PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma yang berperan dalam pengelolaan program kampung iklim Kelurahan Tugurejo, Ketua Kelompok Mangrove, Ketua Bank Sampah Mawar Merah dan masyarakat di Kelurahan Tugurejo, dari segi akademisi yaitu Dosen Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro selain itu dari sisi komunitas yaitu kepada Ketua LSM Yayasan Bintari.

#### **b. Dokumentasi**

Proses dokumentasi menurut Sugiyono (Nilamsari, 2014) unduk dapat membantu meningkatkan dari hasil penelitian maka studi dokumentasi berfungsi

untuk melengkapi penggunaan metode-metode sebelumnya yaitu observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan tambahan data dan tambahan informasi yang berbentuk dokumen, arsip, buku dan gambar ataupun angka dalam bentuk laporan. Pada penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan meminta kepada pihak Kelurahan Tugurejo berupa data yang berhubungan dengan topik yang peneliti ambil. Data tersebut dapat berupa peraturan desa, profil Kelurahan Tugurejo, buku, laporan, ataupun jurnal yang dianggap sesuai topik penelitian untuk kemudian dapat membantu dalam membandingkan dengan teori yang digunakan dengan kenyataan di lapangan selama proses penelitian serta dapat memudahkan peneliti dalam mengelola dan juga menarik kesimpulan.

#### **1.8.6 Analisis dan Interpretasi data**

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data dari tokoh Miles dan Huberman, adapun beberapa langkah yang peneliti pergunakan untuk dapat menganalisis data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan sebuah metode pemilahan, penyederhanaan, serta transformasi dari data yang berasal dari suatu catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini akan dilaksanakan secara kontinu selama proyek penelitian kualitatif sedang berlangsung.

## 2. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dengan baik akan membuat penelitian kualitatif menjadi lebih valid dengan menampilkan matriks, gambar, grafiks, dan bagan. Jenis penyajian data tersebut diperlukan untuk dapat menggabungkan dan menyajikan informasi yang tertata secara sistematis dalam sebuah bentuk yang utuh.

## 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi bagian dari sebuah kegiatan konfigurasi yang padu. Dalam kesimpulan juga dilakukan yang disebut dengan verifikasi selama penelitian berjalan. Verifikasi yang dilakukan yaitu berupa pemikiran dari peneliti pada catatan lapangan selama melakukan tinjauan ulang. Makna yang ada pada data yang diperoleh haruslah diuji kebenaran dan kecocokannya, kedua hal tersebut yang kemudian memperkuat validitas penelitian. Kesimpulan akhir dilakukan pada saat akhir proses pengumpulan data, tetapi peneliti juga harus melakukan verifikasi hasil penelitian, hal ini berguna supaya hasil yang didapatkan nantinya benar-benar mampu dipertanggungjawabkan.

### **1.8.7 Kualitas Data**

Pada penelitian ini nantinya akan menggunakan metode triangulasi untuk menjamin kebenaran dari data yang didapatkan. Pada metode triangulasi sendiri terdiri dari tiga jenis, adalah sebagai berikut :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber didapatkan melalui berbagai informan kunci ataupun informan yang berasal dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat, komunitas, dan akademisi yang berguna sebagai bahan untuk perbandingan jawaban agar data yang diperoleh dalam proses wawancara lebih valid

## 2. Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang berfungsi untuk dapat memastikan bahwa data wawancara mempunyai sinkronisasi dengan temuan langsung yang diperoleh ketika berada di lapangan

## 3. Triangulasi data

Triangulasi data akan dilakukan dengan kembali menanyakan berbagai informasi yang dibutuhkan kepada informan, baik informan kunci ataupun informan pendukung untuk memastikan kredibilitas dari data yang diperoleh.